ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar
Vol. 7, No. 1, November 2026-Januari 2027
e-ISSN : 2774-7034 | p-ISSN : 2774-8014
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/elementary

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) MELALUI PENDEKATAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SDN BALIKPAPAN BARAT

Sahrul Bahri[1], Suyatno[2], Achadi Budi Santosa[3]
Program Studi Magister Manajemen Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta[1,2,3]
e-mail: bahrisahrul1992@gmail.com[1], suyatno@pgsd.uad.ac.id[2], budi.santosa@mp.uad.ac.id[3]

Diterima: *29/10/2026*; Direvisi: *09/11/2026*; Diterbitkan: *23/11/2026*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) melalui pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SD Negeri 009 Balikpapan Barat. Sebagai sekolah dasar yang melayani masyarakat urban di wilayah Balikpapan Barat, tata kelola keuangan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel menjadi krusial guna menunjang pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan peningkatan Rapor Pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Sekolah, Bendahara BOSP, guru, dan komite sekolah, serta melalui observasi dan studi dokumentasi terhadap Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta rekapitulasi realisasi dana BOSP tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tahap perencanaan telah mengadopsi prinsip MBS melalui pelibatan pemangku kepentingan secara aktif dan analisis kebutuhan berbasis Rapor Pendidikan; (2) Pelaksanaan dan penatausahaan dana diimplementasikan secara akuntabel, dibuktikan dengan tingginya serapan dana untuk Standar Proses dan Sarana Prasarana (pengadaan buku paket pendamping kurikulum, instrumen asesmen kognitif, dan bahan ajar yang relevan); (3) Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan tingkat transparansi yang tinggi, ditandai dengan pencatatan administratif pada sistem ARKAS dan pengesahan rutin bulanan oleh pihak terkait. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa integrasi kepemimpinan partisipatif dan kepatuhan terhadap petunjuk teknis mampu menjamin penggunaan dana publik secara optimal untuk peningkatan mutu pendidikan dasar.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, BOSP, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Manajemen Pendidikan, Rapor Pendidikan*

ABSTRACT

This study aims to analyze the accountability of the management of Educational Unit Operational Assistance (BOSP) funds through the School-Based Management (SBM) approach at SD Negeri 009 Balikpapan Barat. As an elementary school serving urban communities in the West Balikpapan area, transparent, participatory, and accountable financial governance is crucial to supporting the achievement of the eight National Education Standards (SNP) and improving the Education Report Card. This study employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews with the principal, BOSP treasurer, teachers, and school committee members, as well as through observations and document analysis of the School Activity and Budget Plan (RKAS) and the recapitulation of BOSP fund expenditures in 2025. The results showed that: (1) the planning stage had adopted SBM principles through active stakeholder involvement and needs analysis based on the Education Report Card; (2) fund implementation and

Copyright (c) 2026 ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar
https://doi.org/10.51878/elementary.v7i1.16776

ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar
Vol. 7, No. 1, November 2026-Januari 2027
e-ISSN : 2774-7034 | p-ISSN : 2774-8014
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/elementary

administration were carried out accountably, as evidenced by the high fund absorption for the Process and Facilities and Infrastructure Standards, including the procurement of supplementary curriculum textbooks, cognitive assessment instruments, and relevant teaching materials; and (3) the reporting and accountability stage demonstrated a high level of transparency, as indicated by administrative records in the ARKAS system and routine monthly validation by relevant parties. The implications of this study confirm that the integration of participatory leadership and compliance with technical guidelines can ensure the optimal use of public funds to improve the quality of basic education.
Keywords: *Accountability, BOSP, Education Management, Education Report Card, School-Based Management (SBM).*

PENDAHULUAN

Pendidikan yang bermutu secara ideal menuntut tersedianya layanan pembelajaran yang adil, relevan, dan berkelanjutan. Dalam tata kelola satuan pendidikan, Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) bukan sekadar sumber pembiayaan rutin, melainkan instrumen untuk menerjemahkan prioritas peningkatan mutu ke dalam program dan layanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 menegaskan prinsip fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam pengelolaan BOSP (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2026). Idealitas tersebut mensyaratkan agar keputusan belanja didasarkan pada kebutuhan nyata sekolah, bukan semata-mata pada kebiasaan anggaran.

Dalam perspektif Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), kewenangan pengambilan keputusan di tingkat satuan pendidikan perlu disertai partisipasi warga sekolah, penggunaan data, dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Perencanaan Berbasis Data mendorong sekolah mengidentifikasi masalah, merefleksikan akar masalah, dan menentukan pembenahan dengan memanfaatkan Rapor Pendidikan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022). Penggunaan data ini penting agar RKAS menghubungkan kebutuhan pembelajaran dengan alokasi sumber daya secara eksplisit. Dalam perspektif Manajemen Berbasis Sekolah, pengelolaan sumber daya perlu diarahkan pada kebutuhan dan prioritas peningkatan mutu pendidikan (Mulyasa, 2023). Sejalan dengan itu, pengelolaan BOSP harus didasarkan pada perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan sasaran program (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2026).

Realitas pengelolaan dana sekolah menunjukkan bahwa tersedianya regulasi dan aplikasi administrasi belum otomatis menjamin keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Kajian mengenai pemanfaatan Rapor Pendidikan menekankan perlunya penggunaan data secara bermakna dalam proses perencanaan, bukan sekadar pemenuhan prosedur administratif (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, 2024). Penelitian tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS juga menunjukkan pentingnya menelaah praktik tata kelola bersama efektivitas penggunaan dana (Maimunah & Elgina, 2023; Nodera et al., 2023). Koordinasi pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam pembahasan kebutuhan dan penyusunan anggaran sekolah (Kusyudiyanto et al., 2023). Digitalisasi administrasi dapat memperkuat keterlacakan transaksi, tetapi hasilnya tetap bergantung pada konsistensi pencatatan dan kapasitas pengelola (Supriyadi et al., 2026).

Konteks empiris penelitian ini adalah SD Negeri 009 Balikpapan Barat, yang mengelola dana BOSP untuk mendukung kebutuhan pembelajaran dan operasional sekolah. Dokumen realisasi tahun 2025 memperlihatkan perubahan jumlah belanja antarbulan serta

Copyright (c) 2026 ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar
https://doi.org/10.51878/elementary.v7i1.16776

ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar
Vol. 7, No. 1, November 2026-Januari 2027
e-ISSN : 2774-7034 | p-ISSN : 2774-8014
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/elementary

variasi alokasi yang dapat dipetakan ke dalam delapan Standar Nasional Pendidikan. Fluktuasi tersebut perlu dibaca bersama jadwal program, dokumen perencanaan, bukti transaksi, dan tujuan kegiatan; angka serapan saja tidak cukup untuk menyimpulkan efektivitas. Kajian pengelolaan dana BOS di sekolah dasar menempatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas sebagai dimensi penting dalam menilai tata kelola pembiayaan (Fakhiroh et al., 2024). Ketidaksesuaian antara prioritas, realisasi, dan bukti pelaksanaan berpotensi melemahkan kepercayaan pemangku kepentingan serta mengurangi ketepatan dukungan anggaran terhadap pembelajaran.

Dampak yang diharapkan dari tata kelola yang akuntabel ialah tersedianya informasi yang dapat ditelusuri, keputusan anggaran yang lebih sesuai kebutuhan, dan penguatan kepercayaan warga sekolah. Secara teoretis, penelitian ini memandang MBS sebagai kerangka yang menghubungkan otonomi sekolah, partisipasi, penggunaan data, serta mekanisme akuntabilitas; hubungan tersebut perlu dibaca sebagai satu siklus manajerial, bukan sebagai unsur yang berdiri sendiri (Aryani, 2026; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2026). Urgensi penelitian terletak pada perlunya bukti kontekstual tentang bagaimana prinsip tersebut dijalankan pada tingkat sekolah. Ketertarikan peneliti berangkat dari pentingnya memastikan bahwa pengelolaan dana publik tidak berhenti pada kepatuhan administratif, tetapi dapat ditelusuri relevansinya terhadap kebutuhan layanan pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, serta akuntabilitas dan transparansi pelaporan dana BOSP melalui pendekatan MBS di SDN 009 Balikpapan Barat. Sejumlah kajian juga menempatkan koordinasi antarpemangku kepentingan sebagai unsur dalam penyusunan anggaran sekolah (Kusyudiyanto et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam praktik akuntabilitas pengelolaan dana BOSP dalam konteks alamiah SDN 009 Balikpapan Barat. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah proses, keputusan, dan konteks pengelolaan, bukan untuk menguji hubungan kausal antarvariabel (Sugiyono, 2022; Creswell & Creswell, 2018). Desain studi kasus dipilih karena fokus penelitian dibatasi pada satu satuan pendidikan dan satu konteks pengelolaan yang spesifik.

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 009 Balikpapan Barat selama tiga bulan. Fokus pengamatan meliputi perencanaan melalui RKAS, pelaksanaan dan penatausahaan melalui dokumen transaksi, Buku Kas Umum (BKU), dan ARKAS, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOSP. Penetapan fokus dan batas kasus dilakukan agar data yang dikumpulkan tetap terkait dengan pertanyaan penelitian serta siklus pengelolaan BOSP yang diatur dalam regulasi (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2026).

Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari kepala sekolah, bendahara BOSP, guru, dan perwakilan komite sekolah melalui wawancara dan observasi. Data sekunder mencakup RKAS, Buku Kas Umum, rekapitulasi realisasi BOSP tahun 2025, dokumen transaksi, serta catatan terkait ARKAS dan SIPLah. Penggunaan beberapa sumber dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang saling melengkapi mengenai keputusan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran (Hariawan et al., 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Data wawancara dan observasi digunakan untuk memahami proses serta konteks praktik, sedangkan dokumen digunakan untuk menelusuri konsistensi antara rencana,

Copyright (c) 2026 ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar
https://doi.org/10.51878/elementary.v7i1.16776

ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar
Vol. 7, No. 1, November 2026-Januari 2027
e-ISSN : 2774-7034 | p-ISSN : 2774-8014
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/elementary

transaksi, dan laporan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik serta pemeriksaan konsistensi informasi antardokumen (Masruroh, 2026).

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014). Data dikelompokkan berdasarkan tahapan pengelolaan BOSP, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban, kemudian dibandingkan dengan prinsip MBS dan ketentuan pengelolaan BOSP. Proses analisis dilakukan berulang agar interpretasi tetap berpijak pada bukti empiris dan tidak menyamakan tingginya serapan dengan efektivitas secara otomatis (Sugiyono, 2022; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2026).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

SD Negeri 009 Balikpapan Barat merupakan satuan pendidikan dasar negeri yang menjadi lokasi studi kasus mengenai akuntabilitas pengelolaan dana BOSP. Dalam konteks penelitian ini, sekolah tidak hanya diposisikan sebagai penerima dana operasional, tetapi sebagai organisasi pendidikan yang harus menghubungkan keputusan penganggaran dengan kebutuhan pembelajaran. Data penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dilakukan melalui RKAS, Buku Kas Umum (BKU), ARKAS, serta dokumentasi transaksi, sehingga alur perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dapat ditelusuri.

Karakteristik tata kelola sekolah memperlihatkan penerapan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) melalui pelibatan kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah. Pola tersebut sejalan dengan prinsip bahwa otonomi sekolah perlu disertai partisipasi dalam pengambilan keputusan dan mekanisme pertanggungjawaban. Dalam praktiknya, keterlibatan pemangku kepentingan menjadi penting karena keputusan pembiayaan tidak berdiri sendiri, melainkan harus merespons kebutuhan layanan pendidikan dan kondisi peserta didik.

Pengelolaan anggaran juga diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022 (Pemerintah Republik Indonesia, 2022), menjadi kerangka regulatif bagi penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan. Dengan demikian, pemetaan realisasi BOSP berdasarkan delapan SNP dapat digunakan sebagai cara analitis untuk melihat hubungan antara belanja sekolah dan agenda peningkatan mutu.

Dari sisi perencanaan berbasis data, dokumen penelitian menunjukkan bahwa sekolah menggunakan Rapor Pendidikan sebagai salah satu dasar identifikasi kebutuhan, terutama pada area literasi, pemahaman Pancasila, dan numerasi pada fase awal. Praktik tersebut konsisten dengan kebijakan Perencanaan Berbasis Data (PBD), yang menempatkan Rapor Pendidikan sebagai sumber informasi untuk mengidentifikasi masalah, melakukan refleksi, dan menentukan pembenahan serta penganggaran melalui RKAS. Penggunaan data tersebut memperkuat alasan substantif di balik setiap alokasi, bukan sekadar memenuhi kelengkapan *administrative* (Kementerian Pendidikan Riset, dan Teknologi, 2022).

Secara keseluruhan, gambaran objek penelitian menunjukkan bahwa SDN 009 Balikpapan Barat mengintegrasikan tiga unsur utama pengelolaan BOSP, yaitu otonomi pengambilan keputusan melalui MBS, penggunaan data untuk menentukan kebutuhan, dan pertanggungjawaban melalui dokumen serta sistem digital. Ketiga unsur tersebut menjadi konteks yang menjelaskan mengapa analisis realisasi BOSP perlu dibaca bukan hanya dari

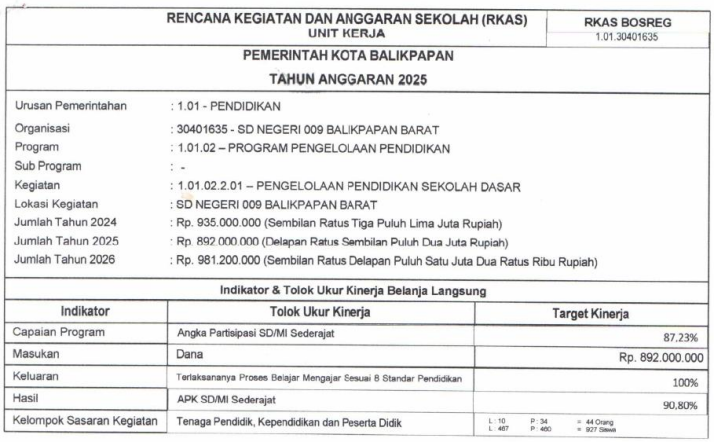
Copyright (c) 2026 ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar
https://doi.org/10.51878/elementary.v7i1.16776

ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar
Vol. 7, No. 1, November 2026-Januari 2027
e-ISSN : 2774-7034 | p-ISSN : 2774-8014
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/elementary

jumlah serapan, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan kebutuhan sekolah, delapan SNP, serta mekanisme akuntabilitas yang diterapkan.

2. Perencanaan Pengelolaan Dana BOSP Melalui Pendekatan MBS

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyusunan RKAS di SDN 009 Balikpapan Barat diawali dengan musyawarah tingkat satuan pendidikan yang melibatkan pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Kepala Sekolah menjelaskan *"iya pak, untuk penyusunan anggaran kita awali dengan rapat bersama tim keuangan, guru dan komite sekolah"*. Proses tersebut menunjukkan bahwa perencanaan tidak sepenuhnya bersifat top-down, tetapi memberikan ruang bagi pihak yang memahami kebutuhan operasional dan pembelajaran di sekolah. Komite mengonfirmasi keterlibatan dalam pembahasan RKAS: *"Iya pak, kami dilibatkan dalam pembahasan RKAS dengan rapat bersama pihak sekolah".* Dalam perspektif MBS, pola ini memperkuat hubungan antara kewenangan pengelolaan di tingkat sekolah dan tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil.



RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
UNIT KERJA

RKAS BOSREG
1.01.30401635

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan	: 1.01 - PENDIDIKAN
Organisasi	: 30401635 - SD NEGERI 009 BALIKPAPAN BARAT
Program	: 1.01.02 – PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Sub Program	: -
Kegiatan	: 1.01.02.2.01 – PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
Lokasi Kegiatan	: SD NEGERI 009 BALIKPAPAN BARAT
Jumlah Tahun 2024	: Rp. 935.000.000 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
Jumlah Tahun 2025	: Rp. 892.000.000 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah)
Jumlah Tahun 2026	: Rp. 981.200.000 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Angka Partisipasi SD/MI Sederajat	87,23%
Masukan	Dana	Rp. 892.000.000
Keluaran	Terlaksananya Proses Belajar Mengajar Sesuai 8 Standar Pendidikan	100%
Hasil	APK SD/MI Sederajat	90,80%
Kelompok Sasaran Kegiatan	Tenaga Pendidik, Kependidikan dan Peserta Didik	L : 10 P : 34 = 44 Orang L : 467 P : 460 = 927 Siswa

Gambar 1. Cuplikan RKAS Murni SDN 009 Balikpapan Barat Tahun Anggaran 2025

Proses identifikasi kebutuhan sekolah dan penentuan prioritas program dalam penyusunan RKAS sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1 menjadi dasar bagi sekolah dalam menetapkan arah perencanaan anggaran. Perencanaan juga menggunakan Rapor Pendidikan sebagai salah satu dasar analisis kebutuhan. Sekolah mengidentifikasi area yang memerlukan penguatan, kemudian menerjemahkannya ke dalam kebutuhan program dan pengadaan. Pendekatan ini sejalan dengan panduan PBD yang menempatkan proses identifikasi, refleksi, dan pembenahan sebagai rangkaian untuk menghasilkan kegiatan yang lebih tepat sasaran dan dapat dituangkan dalam RKAS. Dengan demikian, data pendidikan berfungsi sebagai dasar substantif bagi keputusan anggaran.

Hubungan antara perencanaan dan delapan SNP tampak pada orientasi pembiayaan terhadap proses pembelajaran, sarana dan prasarana, penilaian, pengelolaan, serta kebutuhan pendukung lainnya. Kerangka delapan SNP memberikan ruang bagi sekolah untuk memetakan kegiatan sesuai fungsi dan tujuan layanan pendidikan. Pada tahap ini, kualitas perencanaan tidak hanya ditentukan oleh tersusunnya dokumen RKAS, tetapi juga oleh kemampuan sekolah menghubungkan setiap kegiatan dengan kebutuhan mutu yang teridentifikasi.

Copyright (c) 2026 ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar
https://doi.org/10.51878/elementary.v7i1.16776

ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar
Vol. 7, No. 1, November 2026-Januari 2027
e-ISSN : 2774-7034 | p-ISSN : 2774-8014
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/elementary

Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2026) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP menjadi acuan regulatif untuk pengelolaan dana pada pada kegiatan sekolah. Regulasi tersebut mengatur antara lain penerima dana, alokasi, penyaluran, penggunaan, pengelolaan, serta pemantauan dan evaluasi. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025 juga menegaskan perlunya menyesuaikan komponen penggunaan dengan kebutuhan satuan pendidikan dan menuangkannya dalam dokumen perencanaan. Karena itu, perencanaan partisipatif harus tetap berada dalam koridor regulasi (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025b).

Secara keseluruhan, perencanaan BOSP di SDN 009 Balikpapan Barat memperlihatkan keterkaitan antara partisipasi, penggunaan data, pemetaan kebutuhan mutu, dan kepatuhan terhadap petunjuk teknis. RKAS berfungsi sebagai instrumen yang menerjemahkan hasil musyawarah dan analisis Rapor Pendidikan menjadi program yang dapat dibiayai, sedangkan MBS memberi kerangka bagi sekolah untuk mengambil keputusan sesuai konteksnya. Sintesis ini menunjukkan bahwa perencanaan yang akuntabel dimulai sebelum dana dibelanjakan, yaitu sejak kebutuhan dan alasan penganggaran dirumuskan secara terbuka.

3. Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana BOSP

Pada tahap pelaksanaan, Kepala sekolah menyatakan, *"Setiap pengeluaran dana mengacu pada Rencana kegiatan sekolah yang sudah disusun dan disahkan"*. Rekapitulasi BOSP tahun 2025 menunjukkan bahwa pencairan dana berlangsung secara bertahap, dengan pencairan yang cukup besar pada Januari sebesar Rp446.000.000 dan September sebesar Rp439.395.800. Sementara itu, pengeluaran bulanan tidak selalu mengikuti pola yang sama karena realisasi menyesuaikan jadwal program dan kebutuhan sekolah. Perbedaan antara waktu pencairan dan waktu belanja tersebut penting diperhatikan agar serapan tidak dinilai hanya berdasarkan waktu masuknya dana.

Pada Februari 2025, realisasi pengeluaran sebesar Rp98.656.000 diarahkan antara lain untuk Barang Habis Pakai pendukung kurikulum, seperti buku ESPS Pendidikan Pancasila, buku ESPS Matematika, buku SPM Plus Sumatif, dan buku Pendamping Olimpiade Sains. Pengadaan dilakukan melalui SIPLah. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian dana BOSP diarahkan pada kebutuhan yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembelajaran, terutama penyediaan sumber belajar dan bahan pendukung kurikulum. Bendahara menjelaskan, *"Setiap pembelian yang kita lakukan berdasarkan priorotas kebutuhan sekolah, yang dituangkan pada RKAS"*.

Rekapitulasi penelitian juga memperlihatkan adanya realisasi pada berbagai komponen yang dapat dipetakan ke dalam delapan SNP. Porsi yang relatif besar terlihat pada Standar Sarana dan Prasarana serta Standar Proses, sedangkan komponen lain muncul dengan intensitas yang lebih kecil atau pada bulan tertentu. Pola tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran tidak bersifat seragam antarstandar, karena setiap kegiatan memiliki kebutuhan, jadwal, dan skala pembiayaan yang berbeda.

Penatausahaan dilakukan dengan mendokumentasikan transaksi SIPLah maupun transaksi non-SIPLah ke dalam Buku Kas Umum dan sistem ARKAS. Keterhubungan antara bukti transaksi, pembukuan, dan pencatatan digital menjadi unsur penting dalam menjaga keterlacakan penggunaan dana. Praktik ini relevan dengan tuntutan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, (2025a) yang menempatkan

Copyright (c) 2026 ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar
https://doi.org/10.51878/elementary.v7i1.16776

ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar
Vol. 7, No. 1, November 2026-Januari 2027
e-ISSN : 2774-7034 | p-ISSN : 2774-8014
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/elementary

pengelolaan dan pelaporan sebagai bagian dari tata kelola dana BOSP, sekaligus memperkuat audit trail pada tingkat satuan pendidikan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan dan penatausahaan BOSP di SDN 009 Balikpapan Barat memperlihatkan bahwa realisasi anggaran diarahkan pada kebutuhan program, terutama pembelajaran dan sarana pendukung, serta dicatat melalui mekanisme administrasi yang dapat ditelusuri. Variasi bulanan tidak dengan sendirinya menunjukkan ketidakteraturan, karena harus dibaca bersama jadwal kegiatan dan kebutuhan sekolah. Akuntabilitas pada tahap ini terutama terlihat dari kesesuaian antara kegiatan, transaksi, bukti belanja, dan pencatatan pada sistem yang digunakan.

4. Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan

Akuntabilitas pengelolaan BOSP pada tahap pelaporan terlihat dari tersedianya rekapitulasi bulanan Januari sampai Desember 2025. Dokumen tersebut memuat saldo awal, penerimaan, pengeluaran, peruntukan program atau subprogram, dan sisa kas. Kelengkapan unsur tersebut memungkinkan pihak yang berkepentingan menelusuri perubahan posisi dana dari waktu ke waktu serta menghubungkannya dengan kegiatan yang dibiayai. Guru menjelaskan "iya, *setiap bulannya pada saat rapat kita diberitahu oleh tim keuangan mengenai keadaan keuangan sekolah, baik kegiatan yang akan berjalan maupun saldo kas pada BKU".*

Dokumen penelitian juga menunjukkan bahwa laporan ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh bendahara dan kepala sekolah serta divalidasi oleh pihak terkait di Dinas Pendidikan. Prosedur tersebut membentuk mekanisme pertanggungjawaban vertikal, sementara keterlibatan komite sekolah dalam agenda tutup buku atau evaluasi akhir tahun memperkuat dimensi akuntabilitas horizontal. Dengan demikian, pelaporan tidak berhenti pada hubungan sekolah dengan pemerintah, tetapi juga memiliki dimensi keterbukaan kepada pemangku kepentingan sekolah.

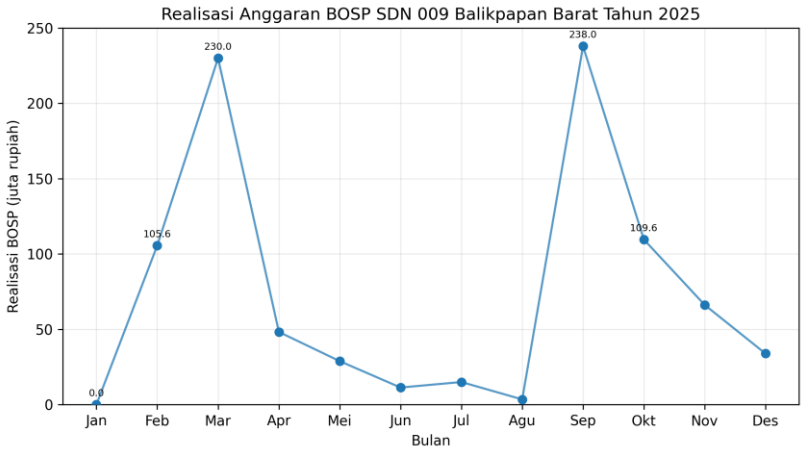
Pemanfaatan ARKAS dan SIPLah memperkuat transparansi administratif karena transaksi dan rencana kegiatan tercatat dalam sistem yang dapat digunakan sebagai dasar pemeriksaan dan rekonsiliasi. Dalam konteks kebijakan BOSP 2025, pengelolaan dana memang diarahkan untuk berlangsung secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan satuan pendidikan. Sistem digital karena itu berfungsi bukan sekadar sebagai alat input, tetapi sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan dokumentasi.

Secara keseluruhan, akuntabilitas dan transparansi pelaporan di SDN 009 Balikpapan Barat ditopang oleh empat praktik yang saling terkait, yaitu pencatatan bulanan, pengesahan oleh pihak yang berwenang, validasi, serta pemanfaatan sistem digital. Keterlibatan komite memperluas ruang pertanggungjawaban dari dimensi vertikal ke dimensi horizontal. Dengan demikian, pelaporan berfungsi sebagai tahap verifikasi atas keseluruhan siklus BOSP, mulai dari keputusan perencanaan sampai bukti realisasi.

Rekapitulasi realisasi BOSP tahun 2025 menunjukkan total pengeluaran sebesar Rp890.135.561. Realisasi tertinggi terjadi pada Maret sebesar Rp230.006.877 dan September sebesar Rp237.985.878, sedangkan Januari belum menunjukkan pengeluaran dan Agustus merupakan realisasi terendah sebesar Rp3.460.878. Pola bulanan ini disajikan pada Gambar 2 untuk memperlihatkan distribusi waktu belanja; interpretasinya perlu mempertimbangkan jadwal kegiatan dan kebutuhan sekolah.

Copyright (c) 2026 ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar
https://doi.org/10.51878/elementary.v7i1.16776

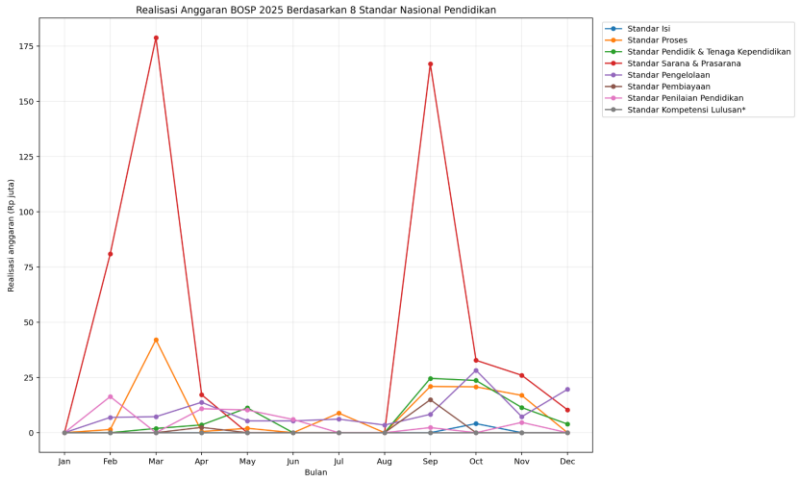
ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar
Vol. 7, No. 1, November 2026-Januari 2027
e-ISSN : 2774-7034 | p-ISSN : 2774-8014
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/elementary



Gambar 2. Kurva realisasi anggaran BOSP per bulan pada SDN 009 Balikpapan Barat Tahun 2025

Sumber: Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOSP/ARKAS SDN 009 Balikpapan Barat, Januari–Desember 2025.

Distribusi realisasi berdasarkan delapan Standar Nasional Pendidikan menunjukkan bahwa Standar Sarana dan Prasarana menonjol pada beberapa periode, terutama sekitar Maret dan September. Standar Proses juga menunjukkan realisasi relatif besar, sedangkan standar lainnya muncul dengan intensitas berbeda sesuai waktu dan kebutuhan program. Gambar 3 menyajikan pola distribusi tersebut untuk membantu pembacaan alokasi anggaran lintas standar.



Gambar 3. Kurva realisasi anggaran BOSP tahun 2025 berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Sumber: Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOSP/ARKAS SDN 009 Balikpapan Barat, Januari–Desember 2025; visualisasi berdasarkan data penelitian.

Grafik berdasarkan delapan SNP memperlihatkan ke mana realisasi diarahkan dan kapan suatu standar menerima pembiayaan. Dominasi komponen Sarana dan Prasarana serta Proses dapat mengindikasikan kebutuhan pengadaan dan dukungan pembelajaran pada periode tertentu, tetapi grafik tidak membuktikan efektivitas secara langsung. Penilaian

Copyright (c) 2026 ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar
https://doi.org/10.51878/elementary.v7i1.16776

ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar
Vol. 7, No. 1, November 2026-Januari 2027
e-ISSN : 2774-7034 | p-ISSN : 2774-8014
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/elementary

efektivitas memerlukan pembandingan dengan target RKAS, keluaran kegiatan, dan indikator mutu yang relevan.

Secara deskriptif, data memperlihatkan dua pola yang saling melengkapi: perubahan realisasi dari bulan ke bulan dan distribusi belanja berdasarkan delapan SNP. Kedua grafik menjadi alat bantu untuk menelusuri hubungan antara waktu realisasi, standar yang didukung, kegiatan yang dibiayai, dan dokumen transaksi. Interpretasi mengenai keberhasilan pengelolaan tetap memerlukan pencocokan dengan rencana, bukti pelaksanaan, dan keluaran program.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BOSP di SDN 009 Balikpapan Barat dapat dibaca sebagai praktik MBS ketika kewenangan sekolah dihubungkan dengan partisipasi, penggunaan data, dan pertanggungjawaban. Pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan RKAS membuka ruang agar keputusan anggaran berangkat dari kebutuhan operasional dan pembelajaran. Namun, partisipasi perlu berlangsung bukan hanya pada perencanaan, melainkan juga dalam pemantauan pelaksanaan dan evaluasi manfaat program. Dalam perspektif Manajemen Berbasis Sekolah, pelibatan warga sekolah dan pengelolaan sumber daya secara mandiri merupakan bagian penting untuk mendukung efektivitas pengelolaan dan peningkatan mutu pendidikan (Mulyasa, 2023). Sejalan dengan itu, ketentuan pengelolaan BOSP menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan dana, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2026). Keterlibatan kepala sekolah, guru, dan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan juga sejalan dengan Abdullah (2017), yang menekankan peran kepemimpinan kepala sekolah, profesionalisme guru, dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan. Temuan ini juga sejalan dengan Rachmawati (2023), yang membahas penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS melalui program RKAS di sekolah dasar.

Temuan tersebut dapat dibandingkan dengan penelitian (Maimunah & Elgina, 2023) yang menemukan bahwa implementasi prinsip akuntabilitas berhubungan dengan efektivitas pengelolaan dana BOS, sedangkan transparansi perlu dilihat bersama konteks kebijakan dan praktik pengelolaan. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa keberadaan dokumen saja belum cukup; kualitas akuntabilitas juga bergantung pada kejelasan prosedur, keterlibatan pihak terkait, dan kemampuan sekolah menunjukkan hubungan antara anggaran, kegiatan, dan hasil yang dituju. Hal ini sejalan dengan Wijaya et al. (2024) yang mengkaji efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di sekolah dasar serta Subha et al. (2023) yang mengidentifikasi faktor-faktor penentu efektivitas pengelolaan dana BOS.

Dari sisi perencanaan, penggunaan Rapor Pendidikan dan RKAS berpotensi memperkuat keterkaitan antara masalah yang teridentifikasi dan prioritas belanja. Hal ini sejalan dengan panduan Perencanaan Berbasis Data yang mendorong sekolah menjalankan identifikasi, refleksi, dan pembenahan secara berurutan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022). Risalah kebijakan terbaru juga menggarisbawahi bahwa pemanfaatan data pendidikan perlu ditingkatkan agar informasi evaluasi benar-benar memengaruhi perencanaan satuan pendidikan (Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, 2024). Karena transparansi dan akuntabilitas merupakan unsur penting tata kelola dana sekolah (Nodera et al., 2023), dokumen RKAS sebaiknya dinilai bukan hanya dari kelengkapan format, tetapi dari keterlacakan hubungan antara masalah, program, indikator, dan biaya. Kebutuhan untuk menghubungkan kebijakan pendidikan dengan pelaksanaan di

Copyright (c) 2026 ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar
https://doi.org/10.51878/elementary.v7i1.16776

ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar
Vol. 7, No. 1, November 2026-Januari 2027
e-ISSN : 2774-7034 | p-ISSN : 2774-8014
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/elementary

tingkat sekolah juga relevan dengan kajian Fitriyah et al. (2026), yang membahas implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan serta implikasinya terhadap mutu pendidikan sekolah dasar.

Pola realisasi bulanan dan distribusi belanja berdasarkan delapan SNP yang disajikan pada bagian hasil menunjukkan variasi waktu dan prioritas pembiayaan. Variasi ini tidak dapat secara langsung dikategorikan sebagai kelemahan atau keberhasilan; interpretasinya memerlukan pencocokan dengan jadwal kegiatan, perubahan RKAS, bukti transaksi, serta keluaran yang dihasilkan. Kajian pengelolaan dana BOS di sekolah dasar menekankan pentingnya menilai efektivitas dan efisiensi bersama bukti penggunaan dana, bukan berdasarkan persentase serapan semata (Fakhiroh et al., 2024). Penelitian Heriman et al. (2024) juga mengkaji pengelolaan dana BOS pada sekolah dasar, termasuk penggunaannya untuk mendukung kebutuhan pembelajaran dan pemeliharaan sarana prasarana. Dalam konteks penelitian ini, grafik berfungsi sebagai alat bantu untuk menemukan pola yang perlu dijelaskan lebih lanjut, bukan sebagai bukti tunggal keberhasilan program.

Dalam aspek penatausahaan dan pelaporan, keberadaan BKU, dokumen transaksi, ARKAS, dan SIPLah menyediakan jejak administratif yang dapat digunakan untuk rekonsiliasi dan pemeriksaan. Digitalisasi dapat membantu meningkatkan keterlacakan dan konsistensi informasi, tetapi tidak menggantikan kebutuhan akan ketepatan input, kompetensi pengelola, dan pemeriksaan berkala (Supriyadi et al., 2026; Fadzillah et al., 2026). Kajian mengenai akuntabilitas dan transparansi dana BOS juga menegaskan bahwa tersedianya dokumen harus dibaca bersama praktik pertanggungjawaban dan efektivitas penggunaan dana (Maimunah & Elgina, 2023). Implementasi kebijakan BOS juga perlu dinilai dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan tujuan peningkatan mutu, bukan hanya kepatuhan formal (Hikma et al., 2025). Perspektif amanah dan *good governance* dalam pengelolaan dana BOS turut memberikan landasan untuk memahami pentingnya integritas, transparansi, dan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana pendidikan (Purnomo, 2026). Sejalan dengan hal tersebut, Nuryanti et al. (2025) mengkaji akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS di Kalimantan Timur. Oleh sebab itu, transparansi yang substantif tidak hanya berarti laporan tersedia, tetapi juga informasi anggaran dapat dipahami dan dijelaskan kepada pemangku kepentingan.

Secara teoretis, hasil ini memperkuat pemahaman bahwa MBS dalam pengelolaan dana merupakan rangkaian yang menghubungkan otonomi, partisipasi, perencanaan berbasis data, pengendalian, dan akuntabilitas. Perspektif tersebut sejalan dengan pembahasan MBS kontemporer yang menekankan pentingnya menyesuaikan kewenangan sekolah dengan kapasitas organisasi dan mekanisme pertanggungjawaban (Aryani, 2026). Implikasi praktisnya, sekolah perlu memastikan bahwa komite dan warga sekolah memperoleh ruang yang bermakna untuk meninjau pelaksanaan dan manfaat program, sedangkan pengelola BOSP perlu mempertahankan konsistensi pencatatan serta evaluasi berbasis bukti. Batasan penelitian ini ialah fokus pada satu sekolah dan dokumen yang tersedia; karena itu, temuan menjelaskan praktik dalam konteks kasus, bukan generalisasi untuk seluruh sekolah. Kajian implementasi kebijakan BOS juga memperlihatkan pentingnya menelaah praktik pengelolaan dalam kaitannya dengan tujuan peningkatan mutu pendidikan (Hikma et al., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan fokus penelitian, pengelolaan dana BOSP di SDN 009 Balikpapan Barat dilaksanakan melalui pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang menempatkan kebutuhan satuan pendidikan sebagai dasar penyusunan program dan anggaran. Pada tahap

Copyright (c) 2026 ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar
https://doi.org/10.51878/elementary.v7i1.16776

ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar
Vol. 7, No. 1, November 2026-Januari 2027
e-ISSN : 2774-7034 | p-ISSN : 2774-8014
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/elementary

perencanaan, proses melibatkan kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah serta memanfaatkan informasi Rapor Pendidikan sebagai salah satu bahan identifikasi kebutuhan. Pada tahap pelaksanaan, realisasi BOSP tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pendidikan melalui delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Data realisasi menunjukkan adanya konsentrasi belanja pada Standar Sarana dan Prasarana serta Standar Proses pada periode tertentu, sementara standar lainnya direalisasikan sesuai kebutuhan program. Pengadaan barang pendukung pembelajaran melalui mekanisme yang tersedia dan pencatatan transaksi dalam administrasi sekolah menunjukkan keterkaitan antara keputusan anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pada tahap penatausahaan, setiap transaksi didukung oleh pencatatan melalui Buku Kas Umum (BKU), ARKAS, dan dokumen transaksi yang relevan. Rekapitulasi realisasi Januari sampai Desember 2025 memberikan gambaran mengenai penerimaan, pengeluaran, peruntukan program atau subprogram, dan sisa kas. Pola realisasi bulanan yang berfluktuasi, dengan realisasi tinggi pada Maret dan September serta realisasi rendah pada Agustus, perlu dipahami berdasarkan jadwal kegiatan dan kebutuhan sekolah, bukan semata-mata sebagai ukuran kualitas pengelolaan. Selanjutnya, pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, akuntabilitas terlihat melalui pengesahan laporan oleh pihak yang berwenang, validasi, serta keterlibatan komite sekolah dalam evaluasi akhir tahun. Pemanfaatan ARKAS dan SIPLah memperkuat keterlacakan administratif karena informasi perencanaan dan transaksi terdokumentasi secara sistematis. Dengan demikian, akuntabilitas pengelolaan BOSP mencakup dimensi vertikal kepada pemerintah dan dimensi horizontal kepada pemangku kepentingan sekolah.

Secara keseluruhan, pengelolaan BOSP di SDN 009 Balikpapan Barat menunjukkan keterkaitan antara perencanaan partisipatif, pelaksanaan berbasis kebutuhan, penatausahaan yang terdokumentasi, dan pelaporan yang dapat ditelusuri. Sekolah disarankan untuk mempertahankan perencanaan pengelolaan BOSP yang partisipatif dengan melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, bendahara, dan komite sekolah serta memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar identifikasi kebutuhan dalam penyusunan RKAS. Bendahara dan tim pengelola BOSP perlu menjaga konsistensi pencatatan transaksi melalui BKU, ARKAS, SIPLah, dan dokumentasi bukti belanja serta melakukan rekonsiliasi secara berkala antara rencana, realisasi, dan saldo. Transparansi kepada pemangku kepentingan juga dapat diperluas melalui penyajian informasi realisasi BOSP dalam bentuk infografis atau media informasi yang mudah dipahami oleh orang tua dan komite sekolah dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak sekolah atau menggunakan pendekatan kuantitatif maupun metode campuran untuk mengkaji keterkaitan pola realisasi BOSP berdasarkan delapan SNP dengan indikator hasil pendidikan serta faktor-faktor yang memengaruhi praktik akuntabilitas pengelolaan dana BOSP.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. (2017). Manajemen mutu pendidikan di sekolah: Peran kepemimpinan kepala sekolah, profesionalisme guru, dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. *Jurnal Penelitian Pendidikan, 17*(3), 190–198. https://doi.org/10.17509/jpp.v17i3.9612

Aryani, R. (2026). *Manajemen berbasis sekolah di era Society 5.0: Konsep, kebijakan, dan praktik dalam pengelolaan pendidikan.* CV Eureka Media Aksara.

Copyright (c) 2026 ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar
https://doi.org/10.51878/elementary.v7i1.16776

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Fadzillah, R., Fitriani, S., & Nuraini, B. (2026). Efektivitas aplikasi RKAS 4.2.9 dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Karangpawitan I Kabupaten Karawang. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 10*(2), 853–872. https://doi.org/10.35931/am.v10i2.6446

Fakhiroh, E. Z., Budi, I. S., & Kholik, A. (2024). Efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di SDN Kowel 3 Pamekasan. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 8*(2), 873–887. https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-madrasah/article/view/3471

Fitriyah, S. N., Hadi, S., & Dewi, R. S. I. (2026). Analisis kebijakan desentralisasi pendidikan pada tingkat sekolah dasar: Kajian implementasi dan implikasi terhadap mutu pendidikan. *Jurnal Ilmiah Global Education, 7*(1), 482–499. https://doi.org/10.55681/jige.v7i1.5243

Hariawan, R., Haromain, H., Rohiyatun, B., Najwa, L., & Suhardi, M. (2025). Peningkatan kompetensi metodologi kualitatif: Pelatihan terpadu manajemen penelitian, analisis data, dan triangulasi. *Jurnal Dedikasi Madani, 4*(2), 93–103. https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/jdm/article/view/18625/9250

Heriman, Hartini, S., Wartini, S., Warman, & Mulawarman, W. G. (2024). Management of educational funds through school operational assistance (BOS) in elementary schools in Sempaja Subdistrict. *Borneo Journal of Primary Education, 4*(1), 1–9. https://journal.uinsi.ac.id/index.php/bjpe/article/view/5763

Hikma, V. A., Abduloh, A., & Purnamaningsih, I. R. (2025). Implementasi kebijakan Dana BOS Permendikbudristek No. 63 Tahun 2023 untuk peningkatan mutu pendidikan. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru, 10*(3), 2171–2180. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5879081

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Panduan pemanfaatan Rapor Pendidikan*. Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025a). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.* https://peraturan.bpk.go.id/Details/321161/permendikdasmen-no-8-tahun-2025

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025b). *Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan untuk pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025.* https://kodingka.kemendikdasmen.go.id/wp-content/uploads/2025/06/SE-SESJEN-KEMENDIKDASMEN-NO-9-TAHUN-2025-.pdf

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/345734/permendikdasmen-no-8-tahun-2026

Kusyudiyanto, N., Santosa, A. B., & Hidayati, D. (2023). Strategi manajemen pembiayaan sekolah swasta dalam menciptakan sekolah unggulan di SMK Muhammadiyah 3

Copyright (c) 2026 ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar
https://doi.org/10.51878/elementary.v7i1.16776

Bandung. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 7*(2), 1834–1857. https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3389

Maimunah, S., & Elgina, S. (2023). Analisis implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi untuk mendorong efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi), 9*(2), 173–188. https://doi.org/10.34204/jiafe.v9i2.8919

Masruroh, M. (2026). Criteria for data validity in qualitative research. *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research, 3*(4), 229–236. https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v3i4.154

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Mulyasa, H. E. (2023). *Manajemen berbasis sekolah (Edisi 4)*. Universitas Terbuka.

Nuryanti, A., Jamaluddin, & Setiawati, L. (2025). The accountability and transparency of school operational assistance (BOS) management in East Kalimantan. *RA Journal of Applied Research, 11*(12), 1102–1106. https://doi.org/10.47191/rajar/v11i12.02

Nodera, M. S., Kusumastuti, R., & Jumaili, S. (2023). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah SMAN 7 Merangin tahun 2021. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 7*(1), 799–809. https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1247

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.* https://peraturan.bpk.go.id/Details/196151/pp-no-4-tahun-2022

Purnomo, H. (2026). *Tinjauan konsep amānah dan good governance dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) (Studi kasus di SMK PGRI 2 Ponorogo)* [Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo]. E-Theses UIN Ponorogo. https://etheses.iainponorogo.ac.id/41269/

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. (2024). *Meningkatkan pemanfaatan data Rapor Pendidikan untuk perencanaan yang lebih efektif di satuan pendidikan* (Risalah Kebijakan No. 10). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. https://pskp.kemendikdasmen.go.id/file/kebijakan/1732075159_file.pdf

Rachmawati, U. (2023). Penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS dalam program RKAS di SDN Made 1 Surabaya. *Jurnal Jendela Pendidikan, 3*(2), 212–219. https://ejournal.jendelaedukasi.id/index.php/JJP/article/view/442

Subha, N. L., Widagdo, S., & Sari, N. K. (2023). Determinants of management effectiveness of school operational assistance funds (Bantuan Operasional Sekolah/BOS) at SDN Kaliglagah 04. *ABM: International Journal of Administration, Business and Management, 5*(1), 61–71. https://doi.org/10.31967/abm.v5i1.719

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2, cetakan ke-29). Alfabeta.

Supriyadi, M. Y., As Zahro, M. A. N., Yozaga, B. T., Adianingsih, P., Harsono, & Indri. (2026). Tranformasi tata kelola dana pendidikan berbasis digital: Peluang, risiko, dan strategi penguatan transparansi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan, 14*(1), 188–191. https://doi.org/10.33751/jmp.v14i1.13241

Wijaya, A. A., Supriyanto, S., Asih, M. S., & Nurkolis, N. (2024). Analysis of the effectiveness of management of school operational assistance funds in elementary schools. *Lembaran Ilmu Kependidikan, 53*(2), 233–242. https://doi.org/10.15294/lik.v53i2.5285

Copyright (c) 2026 ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar
https://doi.org/10.51878/elementary.v7i1.16776